

DAMPAK EKSPLOITASI ENERGI MIGAS BAGI EKONOMI DAERAH

DIDIK SUSETYO

*Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Jalan Palembang-Indralaya,
Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia***ABSTRACT**

Exploitation of oil and gas has been done in the long time ago in South Sumatra. Last decade, many problems come up with decentralized responsibility to natural resources such as primary energy oil and gas between central and local government. Lack of community development activities was complained by native people because it could not generate local economic growth by multiplier effect. Empirically, many projects have already subsidized in some social activities, but those did not educate the native people surround the projects. It caused many enclaves facing dualism behaviour.

In the decentralization era, the new paradigm emerge that many local governments want to share managing the production of primary energy sources, especially oil and gas. Meanwhile, the decline of production of oil and gas will cause future estimation of consumption and contribution to local budget. What's happen in the future exploitation of primary energy of oil and gas to local economic development? Empirically, it's still hope to support the main local budget by equalizing fund programs. The problem is how local economic growth by exploiting oil and gas resources without sacrificing the local sustainable development.

Key Words: Impact, oil & gas energy, local economic

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi daerah dapat dipengaruhi oleh pemanfaatan sumber daya alam yang berada di daerah secara optimal tanpa terganggunya faktor lingkungan hidup. Setiap eksploitasi terhadap sumber daya alam akan menyebabkan perubahan kualitas lingkungan dengan tolok ukur atau ambang batas tertentu. Pemanfaatan sumber daya alam lokal harus menghasilkan produksi untuk kemakmuran daerah, kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan hidup. Hal inilah yang sering kali menimbulkan *trade-off* antara manfaat ekonomi dengan kelestarian lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) (Blakely, 1989: 135).

Kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antardaerah tampak jelas antara daerah yang memiliki sumber daya alam dengan daerah yang tidak memilikinya. Hal tersebut diperparah oleh pengabaian faktor-faktor kedisiplinan dan prinsip-prinsip untuk tidak merusak lingkungan hidup. Tampaknya sanksi yuridis masih menjadi komoditi yang bisa diperdagangkan dan dianggap sepele bagi pelaku eksploitasi sumber daya alam.

Idealnya, tersedianya faktor-faktor *endowment* yang dimiliki daerah menjadi aspek penting dalam memajukan ekonomi lokal dan menjadi faktor percepatan pertumbuhan ekonomi lokal (Samiadji, 2006: 12). Tetapi apa yang terjadi, tampaknya percepatan pembangunan daerah harus mengorbankan kelestarian sumber daya alam, seperti hutan. Sementara itu, sumber daya alam minyak dan gas bumi termasuk kategori yang tidak terbarukan (*unrenewable resources*) telah, sedang, dan bahkan akan terus menjadi faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah penghasilnya. Kecenderungan merosotnya produksi masih terus disiasati untuk dilakukan penemuan sumber-sumber minyak baru agar

memenuhi kebutuhan konsumsi relatif terjaga, terutama ekspor untuk memenuhi kuota dari OPEC. Padahal, menurut prediksi dua puluh lima tahun yang lalu produksi minyak bumi dan gas alam akan habis pada era milenium ketiga ini.

Sumatera Selatan memiliki beberapa sumber daya alam yang relatif ada depositnya, tetapi ada kecenderungan eksploitasi yang “sangat tidak sopan” dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan, terutama masalah eksternalitas yang merugikan (*negative externalities*). Dalam era otonomi daerah, eksistensi Pemerintah Daerah masih dikebiri oleh perundang-undangan, meskipun hanya pemantauan produksi minyak dan gas bumi, serta pertambangan batu bara. Kewenangan daerah masih dikesampingkan sama sekali, padahal obyek kegiatan berada di daerah tersebut.

Beberapa kelemahan dalam pemberian izin yang dilakukan oleh pemerintah pusat sangat merugikan daerah, seperti persyaratan suatu kegiatan yang bersifat eksploitasi tambang sebagai sumber energi primer yang tidak melakukan studi amdal, tidak melakukan *community development*, atau tidak melibatkan sumber daya manusia lokal untuk kegiatan perusahaan. Hal-hal inilah yang sering menimbulkan kecemburuan masyarakat lokal sehingga tidak menumbuhkan kegiatan ekonomi lokal. Sikap *a priori* komunitas lokal terhadap perusakan sumber daya alam yang ada menyebabkan kontra produktif dalam setiap kegiatan investasi. Hal ini berakumulasi pada sikap antipati dan antipartisipasi dalam pembangunan ekonomi lokal. Idealnya baik secara teoritik maupun empirik bahwa daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang dieksploitasi menikmati hasil lebih besar dibanding daerah lainnya. Pertumbuhan ekonomi lokal sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan sumber daya alam lokal, sumber daya manusia lokal, kemajuan teknologi, dan para wirausahaan lokal.

Dewasa ini terjadi kekurangan (*shortage*) dalam produksi energi dibanding kebutuhan untuk konsumsi energi (*Statistik Ekonomi Energi 2004*) di beberapa daerah, termasuk di Sumatera Selatan. Bagaimana strategi untuk menutup kekurangan kebutuhan tersebut, sementara potensi energi primer (seperti minyak, gas, batubara, air, biomasa) di daerah ini relatif tersedia. Konsep untuk menambah produksi energi final yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat adalah meningkatkan produksi besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan lokal dan memasok daerah lainnya. Skenario yang dicanangkan di Sumatera Selatan adalah “Sumatera Selatan menjadi lumbung energi nasional” (*Blueprint Sumatera Selatan Lumbung Energi Nasional 2005*).

Apa saja implikasi dari pencaanangan tersebut? Ada berbagai studi yang mendukung terlaksananya program tersebut, tetapi belum pada tahap implementasi yang besar-besaran. Masih banyak terdapat kesenjangan antara program kebijakan pembangunan energi dengan kewenangan daerah dalam penyediaan infrastruktur lokal. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan seputar progress dari program tersebut, bahkan ada sebagian masyarakat yang sangat pesimis dengan mengutarakan sindiran-sindirannya. Secara konsepsi bahwa Sumatera Selatan akan bisa menjadi lumbung energi nasional bila dipenuhi semua asumsi yang mendukung ke arah program tersebut. Apa saja asumsinya? Berkaitan dengan isu tersebut maka tema yang diangkat dalam tulisan ini adalah dampak potensi energi minyak dan gas bagi ekonomi daerah.

Sejalan dengan isu yang disoroti di latar belakang, dalam tulisan ini masalah yang dikaji adalah bagaimana implikasi dari kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi bagi perekonomian daerah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengungkapkan implikasi dari eksploitasi minyak dan gas bumi bagi perekonomian daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Pikir

Tulisan ini didasarkan pada pemikiran bahwa Sumatera Selatan memiliki kelebihan sumber daya energi minyak dan gas bumi yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat.

Pola eksploitasi minyak dan gas bumi dipercayakan pada perusahaan-perusahaan multinational yang tahu betul resiko, serta besarnya biaya dan manfaat yang dapat dipetik. Kontrak kerja sama produksi dilakukan antara Menteri ESDM RI dengan perusahaan-perusahaan tersebut dalam lingkup komitmen seperti bagi hasil, wilayah eksplorasi, dan jangka waktu eksploitasi (*Blueprint Sumsel Lumbung Energi Nasional*, 2005).

Eksplorasi produksi minyak dan gas bumi selama ini masih belum optimal memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah, karena kebanyakan perusahaan-perusahaan yang beroperasi justru menimbulkan 'enclave-enclave'. Hal ini menyebabkan terbatasnya akses masyarakat sekitar terhadap proses kegiatan produksi. Idealnya, kegiatan produksi membutuhkan ketersediaan sumber daya alam yang dapat dieksploitasi, penggunaan tenaga kerja lokal, perbaikan sarana-sarana sosial dan ekonomi sekitar kegiatan, kemajuan wilayah sekitar kegiatan, dan mengurangi resiko kerusakan lingkungan hidup.

Secara teoritis, kegiatan eksploitasi sumber energi minyak dan gas bumi memiliki dampak eksternalitas positif dan negatif (*positive and negative externalities*) (Oates, 1995). Implikasi dari eksternalitas positif masih belum optimal dinikmati oleh masyarakat lokal, sebaliknya mereka selalu menikmati dampak negatif, seperti polusi, kecemburuan sosial, dan perilaku dualistik pekerja datangan. Muncul pertanyaan mendasar, bagaimana mengeliminir hal-hal tersebut sehingga dapat didayagunakan menjadi kekuatan untuk mendorong *multiplier effect* perekonomian daerah.

Pemberdayaan ekonomi lokal dalam eksploitasi sumber energi minyak dan gas bumi sangat terbuka luas, tetapi ini sangat tergantung dari kemauan dan komitmen manajemen perusahaan. Bentuk umum operasionalnya melalui '*corporate social responsibility*' (CSR), seperti, *community development* (CD) (Samiadji, 2006). Optimalisasi peran CSR ini masih sangat terbatas dan hanya bersifat 'kasihan', tidak nampak program jangka panjang yang dapat mendidik masyarakat sekitar untuk lebih pintar dan bisa bergabung dengan perusahaan. Pola mitra kerja dalam keterkaitan *supply-demand* barang-barang dan jasa lokal (makanan, buah-buahan, peralatan kantor, dan barang-barang keperluan lainnya serta jasa-jasa kebersihan, keamanan, dan pembantu) juga tidak disertai dengan program edukasi yang terencana.

Kinerja Ekonomi Makro dan Paradigma Pembangunan Sumsel

Pembaharuan pemikiran terhadap pembangunan daerah mengalami evolusi kegiatan secara cepat dan mempunyai kinerja yang baik. Hal ini ditandai dengan perencanaan yang baik terhadap program-program pembangunan sehingga terlihat banyak inovasi kegiatan yang menghasilkan berbagai macam barang dan jasa dengan produktivitas tinggi dan meningkatkan kemakmuran daerah.

Paradigma baru pembangunan perekonomian Sumatera Selatan mengalami perubahan mendasar dengan penancangan ikon "Provinsi Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi Nasional dan Lumbung Pangan". Perubahan tersebut didasarkan pada prioritas pembangunan ekonomi yang menekankan pada enam sektor unggulan yaitu pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, dan pariwisata (*Evaluasi Kinerja Pembangunan Sumatera Selatan 2006*). Pertanyaan mendasar muncul terhadap ikon tersebut adalah sejauhmana dampaknya terhadap pelipatgandaan kegiatan di daerah.

Sementara itu, meningkatkan kinerja pemerintahan daerah ke arah realitas ke pemerintahan yang baik untuk memacu kerjasama dan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Mengoptimalkan pendayagunaan potensi berbagai sumberdaya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna meningkatkan daya saing Sumatera Selatan terhadap pasar regional, nasional dan internasional. Meningkatkan pengembangan bidang-bidang unggulan guna mempercepat pengembangan industri serta peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah.

Sejalan dengan upaya meningkatkan kemandirian kabupaten/kota melalui penguatan kemampuan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Hal ini berarti sejalan dengan pendapat Musgrave dalam Susetyo (2006: 14) bahwa kebutuhan dana untuk Provinsi Sumatera Selatan semakin meningkat, seiring meningkatnya pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah yang memiliki luas 87.017 kilometer persegi dan berpenduduk sebesar 6,755 juta jiwa serta terdiri dari 10 kabupaten, 4 kota, 155 kecamatan, 311 kelurahan, dan 2.457 desa.

Sementara itu, fenomena tentang jumlah penduduk miskin sebanyak 2.144.700 Jiwa (31,75%) dan jumlah pengangguran sebesar 287.188 Jiwa (10,3%) memerlukan penanganan segera. Hal ini mengindikasikan bahwa pola pembangunan ekonomi harus mengarah pada upaya pengentasan penduduk miskin dan pengurangan jumlah pengangguran secara terencana.

**Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Selatan
Tahun 2000 – 2005 (Juta Rupiah)**

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	PDRB DNG MIGAS	PDRB TANPA MIGAS	PDRB DNG MIGAS	PDRB TANPA MIGAS
2000	41.317.799	27.983.455	41.317.799	27.983.455
2001	47.100.293	31.960.051	42.337.430	28.804.122
2002	49.500.159	35.773.989	43.643.276	30.083.324
2003	55.938.675	40.113.615	45.247.401	31.810.725
2004	64.319.375	45.470.766	47.344.395	33.969.083
2005	81.532.287	52.727.451	49.634.518	36.318.656
2006	95.929.140	63.500.445	52.215.287	38.971.463
r (%)	15,07	14,63	3,97	5,68

Sumber: BPS, *PDRB Sumatera Selatan 2007*, kerjasama BPS dengan Bappeda Sumsel, diolah

*r = pertumbuhan rata-rata 2000-2006

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebaiknya memiliki berbagai strategi untuk menyiasati percepatan pembangunan yang lebih fokus untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mari kita telusuri berbagai perkembangan yang berkaitan dengan percepatan pertumbuhan ekonomi lokal dan skenario pembangunan energi migas yang dilematis untuk daerah di masa mendatang.

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan PDRB Sumatera Selatan harga konstan dengan migas sebesar 3,97% dan tanpa migas sebesar 5,68% periode 2000-2006. Namun bila dihitung rasionya yang sering disebut dengan indeks implisit PDRB Sumatera Selatan cukup merisaukan. Hal ini terlihat bahwa indeksnya meningkat relatif tajam melebihi peningkatan nilai PDRB tersebut. Ini mengindikasikan bahwa tingkat inflasi di daerah ini sangat tinggi dalam periode tersebut.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan 2006 untuk tanpa migas sebesar 7,31 persen (nasional sebesar 5,60 persen), sedangkan dengan migas sebesar 5,20 persen. Nilai total PDRB harga berlaku 2005 tanpa migas sebesar Rp. 52,727 trilyun dan dengan migas sebesar Rp. 81,522 trilyun, sementara itu secara nasional sebesar Rp. 639,7 trilyun (dengan migas), untuk tahun 2006 dengan migas sebesar Rp 95,93 trilyun dan tanpa migas Rp 63,50 trilyun (*Evaluasi Kinerja Pembangunan Sumatera Selatan 2006*).

Perkembangan PDRB harga konstan menurut sektor mengalami peningkatan yang tidak merata. Beberapa sektor memiliki perkembangan cukup pesat antara lain sektor pengangkutan dan komunikasi, keuangan dan jasa perusahaan, bangunan dan konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, dan listrik, gas, dan air bersih. Sementara itu, beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan yang relatif lambat adalah pertambangan dan penggalian, jasa-jasa, industri pengolahan, dan sektor pertanian.

Jika disimak perkembangan sektor pertambangan dan penggalian bahwa pada tahun 2000 nilai PDRB harga konstan sebesar Rp 2.062,31 milyar dan meningkat menjadi sebesar Rp 14.004,90 milyar tahun 2005. Sementara itu, sektor listrik, gas dan air bersih pada tahun 2000 sebesar Rp 108,09 milyar meningkat menjadi sebesar Rp 232,33 milyar tahun 2005. Peningkatan yang relatif lambat ini akan berdambak pada upaya-upaya percepatan investasi untuk mendukung Sumsel sebagai lumbung energi nasional dan lumbung pangan.

Pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan ekonomi riil Sumatera Selatan relatif moderat, baik dengan migas maupun tanpa migas. Hal ini dapat disimak bahwa pertumbuhan PDRB dengan migas relatif rendah dibanding dengan pertumbuhan PDRB dengan migas. Ini menunjukkan bahwa percepatan sektor primer khususnya berbasis pertambangan dan penggalian (SDA yang *unrenewable*) akan mengalami penurunan pertumbuhan secara bertahap.

Ada hal yang menarik dalam memacu pertumbuhan ekonomi non-migas di Sumatera Selatan karena sektor-sektor ini menjadi unggulan daerah tetapi proporsi investasi yang teralokasi ke sektor ini relatif rendah. Berarti percepatan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi sulit untuk direalisasikan. Sektor-sektor unggulan Sumatera Selatan berbasis pada sektor primer sehingga sangat labil terhadap kegoncangan harga dan kualitas produk.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan masih memiliki peluang untuk ditingkatkan bila optimalisasi investasi terus dilakukan. Hal ini tentunya tidak tergantung pada kuantitas produksi semata, melainkan juga kuantitas dan kualitas infrastruktur yang ada dewasa ini harus ditingkatkan agar infrastruktur ekonomi dapat memperlancar roda aktivitas ekonomi. Sementara itu, upaya pengurangan tingkat pengangguran di Sumatera Selatan harus dilakukan dengan upaya-upaya pembukaan kesempatan kerja baru. Ini berarti membutuhkan investasi baru, karena investasi sektor formal dewasa ini memiliki tingkat elastisitas yang tidak elastis.

Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan menurut Lapangan Usaha Tahun 2002 – 2006 (dalam Persen)

Lapangan Usaha	2002	2003	2004	2005	2006
1. Pertanian	4,49	4,69	6,14	5,13	6,44
2. Pertambangan dan Penggalian	0,64	1,95	0,83	1,87	0,36
3. Industri Pengolahan	3,70	4,64	6,21	5,89	5,30
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	2,13	1,80	5,71	6,83	7,67
5. Bangunan	5,82	6,69	8,56	7,18	7,25
6. Perdag, Hotel dan Restoran	4,90	5,24	6,21	7,17	7,93
7. Pengangkutan & Komunikasi	5,86	7,65	11,42	11,73	10,56
8. Keuangan, sewa & Jasa Perush.	4,05	5,25	7,12	8,37	8,26
9. Jasa-jasa	2,74	3,18	3,36	4,15	7,90
PDRB dengan Migas	3,08	3,68	4,63	4,84	5,20
PDRB tanpa Migas	4,44	5,74	6,79	6,92	7,31

Sumber: BPS, *PDRB Sumatera Selatan 2007*, kerjasama BPS dengan Bappeda Sumsel

Sebenarnya, tahun 2006 pertumbuhan PDRB Sumatera Selatan berada di atas rata-rata nasional, sementara jika dibandingkan Provinsi Babel masih berada di bawah rata-rata nasional. Sektor pengangkutan dan komunikasi di Sumatera Selatan menunjukkan pertumbuhan tertinggi (10,56%), sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan (8,25%). Jika dibandingkan, pertumbuhan ekonomi triwulan pertama tahun 2006, pertumbuhan ekonomi Sumsel sebesar 6,50 persen dan Babel sebesar 5,80 persen.

Dilema relatif moderatnya pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan yang belum terpecahkan adalah sulitnya upaya untuk melakukan pengembangan produk-produk turunan (hilir) dari komoditi tradisional. Hal ini menjadi isu menarik untuk dilakukan kajian selanjutnya karena untuk menciptakan nilai tambah dari produk-produk tradisional perlu kesungguhan dari pelaku bisnis yang difasilitasi dengan kondusifnya investasi di Sumatera Selatan.

Sruktur Ekonomi. Indikator yang digunakan untuk mengetahui struktur ekonomi daerah adalah persentase sumbangan ekonomi menurut sektor-sektor ekonomi. Struktur ekonomi Sumatera Selatan masih didominasi tiga sektor yang memberikan sumbangan terbesar. Sektor-sektor yang dimaksud antara lain sektor industri pengolahan (21,41 persen), sektor pertanian dalam arti luas (20,54 persen) dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (20,15 persen).

Pergeseran struktur ekonomi Sumatera Selatan dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier berjalan sangat lambat (*Evaluasi Kinerja Pembangunan Sumsel 2006*). Hal ini memperlihatkan konsepsi percepatan pembangunan ekonomi tidak disiplin pada program pembangunan yang mengarah pada paradigma tersebut. Perubahan struktur ekonomi akan berlangsung relatif lama, tetapi bila hal ini disiasati untuk dicapai dengan kesungguhan komitmen untuk mempercepat perubahan struktur ekonomi maka akan terealisasi.

Cukup banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mencapai perubahan sruktur ekonomi Sumatera Selatan. Salah satu bukti bahwa strategi pembangunan ekonomi mengalami berbagai skenario perubahan yang tampaknya sangat tergantung dari elit yang berkuasa pada waktu itu. Hal ini yang akan menyulitkan kebijakan karena prinsip *sustainability development* tidak dilaksanakan dan pola perencanaan yang terkesan coba-coba (*trial and error*).

Pendapatan Perkapita. Tingkat kesejahteraan masyarakat dan daya beli masyarakat di Sumatera Selatan dicerminkan oleh pendapatan perkapita. Perkembangan pendapatan perkapita relatif lambat. Pada Tabel 3 untuk tahun 2006 pendapatan regional perkapita tanpa migas harga konstan sebesar Rp4.738.930, sedangkan dengan migas sebesar Rp6.367.505. Sementara itu, PDRB perkapita tanpa migas harga konstan sebesar Rp5.648.127 dan dengan migas sebesar Rp7.567.551. Tingkat pendapatan perkapita ini sekaligus mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi tampaknya berkembang relatif lambat. Tolok ukur ini sangat makro sehingga belum mencerminkan sebagian penduduk yang masih tergolong miskin. Apalagi melihat angka pendapatan perkapita yang cukup fantastis tersebut dibanding dengan sebagian penduduk yang dalam kenyataannya hidup di bawah garis kemiskinan (*Evaluasi Kinerja Pembangunan Sumatera Selatan 2006*).

Tabel 3. PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Sumatera Selatan Tahun 2000 – 2006 Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	PDRB per kapita	Pendapatan Regional per kapita	PDRB per kapita	Pendapatan Regional per kapita
2000	6.693.948	5.632.436	4.533.634	3.803.841
2001	6.730.690	5.663.351	4.579.201	3.842.072
2002	6.813.226	5.732.799	4.696.359	3.940.371
2003	6.941.072	5.840.372	4.879.850	4.094.325
2004	7.142.641	6.009.976	5.124.766	4.299.816
2005	7.346.840	6.181.794	5.375.843	4.510.476
2006	7.567.551	6.367.505	5.648.127	4.738.930
r (%)	2,06	2,07	3,73	3,73

Sumber: BPS, *PDRB Sumatera Selatan 2007*, kerjasama BPS dengan Bappeda Sumsel, diolah

*r = pertumbuhan rata-rata 2000-2006

Pertumbuhan Pendapatan Regional perkapita dengan migas tahun 2000-2006 rata-rata sebesar 2,07%, sedangkan tanpa migas sebesar 3,73. Tampaknya percepatan pertumbuhan pendapatan regional dengan migas sangat lambat berarti ini juga cerminan peningkatan kesejahteraan (daya beli) masyarakat relatif lambat. Sementara itu, pertumbuhan PDRB perkapita tanpa migas tahun 2000-2006 juga relatif lambat yaitu sebesar 3,73% pertahun dan dengan migas sebesar 2,06% pertahun. Pertumbuhan pendapatan regional perkapita tanpa

migas lebih baik dibanding dengan migas. Ini mengindikasikan bahwa kontribusi sektor tanpa migas relatif meningkat.

Apabila menyimak jumlah penduduk di Sumatera Selatan tahun 2005 sebesar 6,755 juta jiwa tersebar di 10 kabupaten, 4 kota, 155 kecamatan, 311 kelurahan dan 2.457 desa merupakan potensi pembangunan yang dapat dioptimalkan untuk mempercepat pertumbuhan. Namun di sisi lain, tingkat kemiskinan penduduk Sumatera Selatan relatif tinggi yaitu sejumlah 2.144.700 Jiwa (31,75 %), hal ini membutuhkan upaya nyata untuk segera mengurangi jumlah penduduk miskin tersebut. Demikian juga, jumlah angkatan kerja di Sumatera Selatan sebesar 3,356 juta dan jumlah pengangguran sebesar 287.188 jiwa (10,3%) menjadi agenda pembangunan untuk diberdayakan sehingga kesempatan kerja terbuka luas untuk mengurangi tingkat pengangguran.

Keuangan Daerah. Keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah akan tercermin dari indikator-indikatornya. Menurut Susetyo (2006) bahwa peranan perimbangan keuangan dari sektor migas masih memberikan kontribusi yang signifikan. Hal ini tampak dari beberapa daerah penghasil migas sehingga memiliki kemampuan keuangan daerah. Namun, beberapa daerah tersebut justru memiliki beberapa indikator kesejahteraan sangat memprihatinkan, seperti rendahnya rata-rata pendapatan perkapita, tingginya tingkat pengangguran, tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya IPM, dan masih terbatas infrastruktur. Ini berarti belum menyentuh hakekat kedua UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang seharusnya membawa implikasi antara lain keleluasan (*deskresi*) yang lebih luas, otonomi mengurus urusan rumah tangga sendiri, mandiri dalam pelayanan kepada masyarakat, dan berusaha memenuhi kebutuhan minimum pelayanan masyarakat.

Secara empirik, beberapa prinsip yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah belum terlaksana dengan semestinya, antara lain prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, pertanggung-jawaban kepada masyarakat. Seyogyanya dana berasal dari migas akan lebih bermakna untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dan optimalisasi *endowment factors* daerah. Idealnya juga tidak menyimpang dari fungsi anggaran sebagai alat perencanaan, alat pelaksanaan kegiatan, dan alat pengawasan atau pengendalian.

Sebagai ilustrasi, *pendapatan* adalah semua penerimaan yg merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi penerimaan kas daerah. Komposisi penerimaan daerah tahun 2005 untuk Sumatera Selatan sebesar Rp 5,47 triliun, terdiri atas PAD sebesar Rp 827 milyar (15 persen), DAU sebesar Rp 2.514 milyar (46 persen), dana perimbangan sebesar Rp 1.993 milyar (36 persen), dan dana penyeimbang sebesar Rp 138 milyar (3 persen). Fenomena rendahnya PAD menjadi hal yang klasik untuk diperdebatkan, tetapi dana hasil bagi migas menjadi menarik untuk dikaji terutama layak tidaknya dalam hal pemanfaatannya. Selanjutnya, *belanja* adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yg akan menjadi pengeluaran kas daerah. Semua pos belanja daerah dalam APBD harus dikelola secara benar sesuai dengan prinsip-prinsip pembelanjaan. Fenomena besarnya belanja aparatur daerah dibanding belanja pelayanan publik menjadi salah satu bahan kajian, apalagi bersumber dari hasil bagi migas. *Pembiayaan* adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit untuk memanfaatkan surplus. Beberapa pos dalam pembiayaan berpotensi bermasalah, seperti dana cadangan, dana depresiasi, pinjaman daerah, hasil penjualan aset yang dipisahkan, penerimaan pelunasan utang, sisa perhitungan anggaran tahun lalu.

Secara normatif, pengelolaan keuangan daerah bertujuan antara lain: (1) mewujudkan masyarakat madani yang bebas KKN; (2) mewujudkan *Good governance of local public*, transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, efisiensi, memperhatikan HAM; (3) *Public accountability*, adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat (Susetyo, 2006: 4). Indikator kesuksesan sistem desentralisasi fiskal melalui pengelolaan keuangan daerah akan tercermin pada perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat

Terkait dengan pengelolaan keuangan yang berasal dari bagi hasil migas seharusnya dioptimalkan untuk mendukung pelipatgandaan aktivitas ekonomi lokal, namun belum optimal. Hal ini sejalan dengan salah satu agenda pembangunan Sumatera Selatan antara lain: Mewujudkan Sumsel menjadi Lumbung Energi Nasional, mewujudkan Sumsel menjadi lumbung pangan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa strategi pembangunan ekonomi yang diprioritaskan adalah: (1) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,0% melalui peningkatan ekspor dan investasi; (2) Mendorong kegiatan sektor riil dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam upaya pengurangan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja; (3) Penurunan kemiskinan dan kesenjangan melalui revitalisasi sektor pertanian, pedesaan, dan pengembangan UMKM (*Evaluasi Kinerja Pembangunan Sumsel 2006*).

Iklim investasi dan bisnis. Percepatan pembangunan daerah dipengaruhi oleh ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Kegiatan investasi baik di sektor riil dan sektor keuangan di Sumatera Selatan masih belum berkembang pesat. Fenomena semakin tumbuhnya lembaga-lembaga keuangan dan perbankan akan menjadi barometer pertumbuhan sektor ini dalam mendorong kemajuan ekonomi daerah (Susetyo, 2004: 5). Apabila perkembangan fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal, maka alternatif sumber pembiayaan investasi dan bisnis turut berkembang pesat.

Indikasi semakin menjamurnya beberapa fasilitas pembiayaan, seperti *leasing*, *financing*, dan *banking* di daerah menggambarkan adanya perkembangan yang positif, baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah daerah. Namun di sisi lain, ada indikasi kegiatan investasi riil belum tampak menggembirakan terutama pada sektor-sektor unggulan. Realisasi investasi baik penanaman modal baru maupun perluasan aktivitas yang sudah ada berjalan sangat lambat, apalagi di sektor minyak dan gas masih dalam tataran MOU.

Rasionalitas dari sebagian masyarakat mulai tampak dalam situasi ketidakpastian, terutama sulitnya mengajukan kredit perbankan dengan segala konsekuensinya. Hal ini terlihat dari keberanian lembaga pembiayaan kredit selain perbankan yang telah mendukung masyarakat untuk membeli barang dengan fasilitas pembiayaan tersebut. Semakin banyak alternatif fasilitas sumber pembiayaan kredit, semakin banyak pilihan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan fasilitas tersebut. Fenomena kredit perbankan yang masih dalam '*tight money policy*' belum memberikan dukungan yang besar pada aktivitas investasi riil. Padahal kondisi makro ekonomi menunjukkan perbaikan di beberapa indikatornya, seperti tingkat inflasi, SBI, nilai kurs, dan ISHG (Susetyo, 2004: 6).

Aspek lain yang tidak kalah menarik untuk dikaji adalah pelayanan birokrasi pemerintah untuk kegiatan investasi. Hal ini terungkap dari sebagian investor yang mengatakan bahwa sumber pembiayaan investasi tersedia relatif banyak, tetapi satu hal yang masih menyulitkan untuk merealisasi kegiatan tersebut adalah ketepatan dan kecepatan pelayanan birokrasi. Inilah salah satu kendala dalam melayani perizinan untuk investasi sehingga bagaimana pelayanan publik ini bisa cepat, tepat, mudah dan murah.

Perkembangan bisnis dan ekonomi daerah semakin maju akan menimbulkan banyak permintaan pada fasilitas pembiayaan untuk investasi. Kebijakan yang terpadu dari berbagai instansi pemerintah daerah, pelaku bisnis, sektor pembiayaan dalam mendukung investasi sesuai koridornya masing-masing membutuhkan kemauan yang kuat dari pengelolanya. Sejalan dengan perkembangan tersebut menurut analisis Susetyo (2004: 8) bahwa prospek ekonomi lokal menghadapi beberapa tantangan antara lain sektor perdagangan mengalami penurunan, fluktuasi harga dunia mengkondisikan ketidakpastian, teknologi sektor pertambangan pada posisi *stagnan*, investasi sektor infrastruktur belum kondusif, dan euforia *local god governance* masih dalam tahap konsolidasi.

Kendala dan Prospek Ekonomi Daerah. Beberapa waktu yang lalu ulasan Bank Indonesia Palembang yang dikutip Susetyo (2006: 6) bahwa beberapa kendala yang masih dihadapi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan antara lain: (1) ketidakpastian harga minyak dunia sehingga menyebabkan kondisi pasokan yang terbatas,

permintaan meningkat, kemungkinan ketidakstabilan politik dan keamanan di Timur Tengah; (2) berlanjutnya kondisi ketidakseimbangan global, mengakibatkan kenaikan biaya produksi dan penurunan *consumer confidence* dan aliran modal ke negara *emerging market* masih terbatas; (3) belum adanya kepastian pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang investasi dan sektor riil karena penyelesaian UU dan peraturan menyangkut perbaikan iklim investasi seperti peraturan pemerintah yang terkait dengan UU Penanaman Modal, Energi, Perpajakan, perburuhan, energi, infrastruktur, dan ekspor termasuk untuk meningkatkan penanaman modal asing.

Lebih lanjut Bank Indonesia mempunyai beberapa upaya pembenahan yang tidak dapat dilakukan secara parsial, baik di tingkat makro misalnya kebijakan moneter diarahkan untuk membawa laju inflasi pada tingkat yang rendah untuk meningkatkan daya beli dan daya saing perekonomian. Sementara itu, di tingkat mikro beberapa upaya segera dilakukan antara lain melanjutkan konsolidasi perbankan melalui implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API), melakukan pemetaan yang menyeluruh terhadap potensi sistem keuangan melalui implementasi Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), menyiapkan jaring pengaman sektor keuangan, menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah khususnya di bank-bank Pemerintah, dan menyediakan saluran khusus bagi peningkatan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Secara empirik, beberapa langkah konkrit yang perlu digenjut meliputi efisiensi birokrasi, regulasi ketenagakerjaan dan kepaillitan, perpajakan, kesiapan infrastruktur, sumber pembiayaan, penyelesaian atas masalah ketidakseimbangan ekonomi global, melalui penyesuaian *aggregate demand* dan mungkin nilai tukar dapat menimbulkan tekanan terhadap stabilitas pasar keuangan di Asia, dan menyikapi *high commodities prices*, khususnya minyak dan komoditi primer lainnya dapat memberikan tekanan yang berat terhadap laju inflasi lokal, regional, nasional, dan global.

Sumsel Lumbung Energi dan Potensi Energi Migas

Implikasi dari penancangan ikon lumbung energi bagi Sumatera Selatan membawa konsekuensi logis semakin maraknya minat investor untuk datang ke Sumatera Selatan (*Evaluasi Kinerja Pembangunan Sumsel 2006*). Namun, banyak persyaratan dan kejelasan yang dituntut oleh investor berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur daerah untuk keberlangsungan investasinya. Inilah masalah yang harus dipecahkan dan didiskusikan untuk mencari alternatif solusi terbaik dalam menciptakan daerah semakin kondusif untuk investasi. Secara empirik terjadi '*pros & con*' terhadap langkah-langkah dan realisasi Sumatera Selatan menjadi lumbung energi nasional.

Sementara itu, fenomena potensi sumberdaya energi primer di Sumatera Selatan cukup menjanjikan, tetapi dampak eksternalitas positif (*positive externalities*) bagi ekonomi lokal sangat tidak terlihat. Sangat dilematis karena eksploitasi yang telah bertahun-tahun belum dapat mensejahterakan masyarakat secara signifikan. Bahkan banyak menimbulkan dampak negatif (*negative externalities*) yang merugikan keberlanjutan pembangunan, seperti kualitas lingkungan yang merosot (*Studi Pengembangan Pembangunan Listrik 4x600 MW di Musi Rawas 2006*).

Untuk mengetahui gambaran tentang deposit sumber daya energi primer, khususnya minyak bumi dan gas alam di Sumatera Selatan dapat disimak uraian berikut ini.

Minyak Bumi. Hasil penelitian *Blueprint Sumsel Lumbung Energi 2005* menyebutkan bahwa cadangan minyak bumi di Sumatera Selatan kurang lebih 704.518,0 MSTB yang terdiri dari cadangan terbukti 404.271,2 MSTB, cadangan mungkin 128.880,8 MSTB, dan cadangan harapan 171.366,0 MSTB (lihat Tabel 4). Bila dirinci berdasarkan lapangan yang telah beroperasi dan belum beroperasi, maka cadangan tersebut terdiri dari 657.605,8 MSTB

berada di lapangan yang telah beroperasi, dan sisanya 47.312,2 MSTB berada di lapangan yang belum operasi. Implikasi dari besarnya cadangan tersebut masih dilematis bagi ekonomi daerah karena tidak langsung dinikmati oleh masyarakat. Data ini masih butuh analisis kajian untuk eksploitasi ke depan yang butuh tenaga, biaya, dan teknologi yang relatif canggih.

Tabel 4. Cadangan Minyak Bumi di Sumatera Selatan 2005

No	Daerah	Cadangan (MSTB)			
		Terbukti	Mungkin	Harapan	Jumlah
1	Banyuasin	11.008,6	400,0	359,0	11.767,6
2	Lahat	4.007,9	11.196,4	14.504,6	29.708,9
3	Muara Enim	130.820,4	37.287,4	84.289,5	252.397,3
4	Musi Banyuasin	174.075,8	55.091,6	43.335,2	272.502,6
5	Musi Rawas	61.786,6	10.728,0	11.357,0	83.871,6
6	Ogan Komering Ilir	12.528,3	2.298,7	0,0	14.827,0
7	Ogan Komering Ulu	8.628,4	10.463,6	17.065,0	36.157,0
8	Prabumulih	1.415,2	1.415,1	455,7	3.286,0
Jumlah Se-Sumsel		404.271,2	128.880,8	171.366,0	704.518,0

Sumber: Ditjen Migas, Blueprint Sumsel Lumbung Energi, ESDM Tahun 2005

Gas Bumi. Cadangan gas bumi di Sumatera Selatan kurang lebih 24.015,46 BSCF yang terdiri dari cadangan terbukti 7.489,21 BSCF, cadangan mungkin 5.406,30 BSCF, dan cadangan harapan 11.119,95 BSCF (lihat Tabel 5).

Tabel 5. Cadangan Gas Bumi di Sumatera Selatan

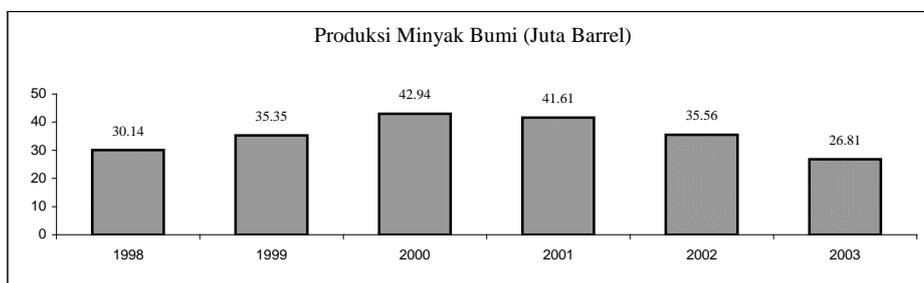
No	Daerah	Cadangan (BSCF)							
		Terbukti		Mungkin		Harapan		Jumlah	
		Assoc	Non Ass	Assoc	Non Ass	Assoc	Non Ass	Assoc	Non Ass
1	Banyuasin	83,98	-	2,21	-	15,12	-	101,31	-
2	Lahat	5,76	153,23	1,78	42,35	3,03	-	10,57	195,58
3	M. Enim	491,64	3.306,37	70,66	2.422,87	50,64	6.134,89	612,94	11.864,1
4	MUBA	159,57	2.022,06	28,67	2.354,49	13,46	4.805,38	201,70	9.181,93
5	Musi Rawas	585,94	537,02	152,1	260,10	14,17	13,60	752,29	810,72
6	OKI	7,26	10,01	1,36	-	-	-	8,62	10,01
7	OKU	13,58	112,79	15,22	54,41	15,73	53,93	44,53	221,13
Jumlah se-Sumsel		1.347,73	6.141,48	272,1	5.134,22	112,2	11.007,8	1.731,96	22.283,5
		7.489,21		5.406,30		11.119,95		24.015,46	

Sumber: Ditjen Migas, Blueprint Sumsel Lumbung Energi, ESDM Tahun 2005

Bila dirinci berdasarkan lapangan yang telah beroperasi dan belum beroperasi, maka cadangan tersebut terdiri dari 21.720,81 BSCF berada di lapangan yang telah beroperasi, dan sisanya 2.294,65 BSCF berada di lapangan yang belum operasi. Potensi ini tampaknya sangat menjanjikan untuk mendukung Sumsel sebagai lumbung energi nasional. Bagi hasil penerimaan dari SDA berupa minyak dan gas berupa 'block grant' di Sumsel belum sepenuhnya untuk pelayanan publik, tetapi diduga teralokasi untuk kepentingan yang lainnya.

Produksi Energi Migas. Produksi minyak bumi Sumatera Selatan tampaknya terus meningkat dari tahun ke tahun sampai tahun 2000. Pada tahun 1998 produksi minyak bumi Sumatera Selatan sebesar 30,14 juta barrel dan pada tahun 2000 produksi minyak bumi meningkat hingga mencapai 42,94 juta barrel (lihat Gambar 2). Namun sesudah tahun 2000 produksi minyak bumi Sumatera Selatan menurun hingga menjadi 26,81 juta barrel pada tahun 2003. Dari sisi pengembangannya, dengan asumsi bahwa kapasitas tambang minyak bumi tidak bertambah karena tidak ada penambahan tambang baru, maka pengembangan hasil penambangan minyak bumi diasumsikan relatif tetap. Apabila tidak ditemukan cadangan-cadangan baru, maka produksi minyak bumi hanya dapat dilakukan sampai tahun 2011. Oleh

karena itu peningkatan usaha eksplorasi harus segera dilakukan secara intensif, terutama eksplorasi terhadap bekas-bekas tambang minyak yang sebenarnya masih mempunyai potensi cadangan yang diestimasi sebesar 40% (*Blueprint Sumsel Lumbang Energi 2005*).



Gambar 2 Produksi Minyak Bumi Sumatera Selatan

(Sumber: Ditjen Migas, *Blueprint Sumsel Lumbang Energi, ESDM Tahun 2005*)

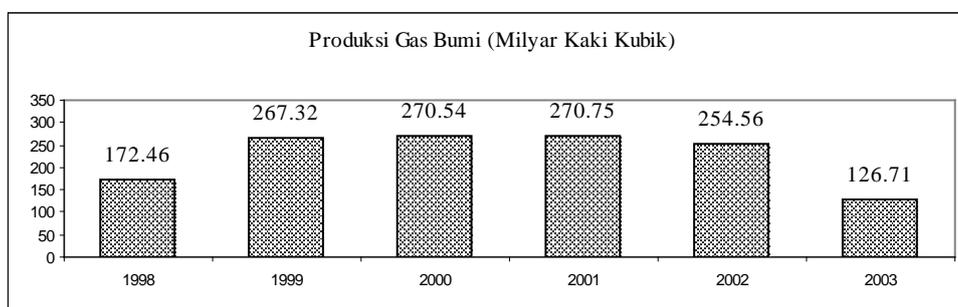
Pada Tabel 6 dapat disimak perkiraan akumulasi produksi jika dilakukan eksplorasi secara intensif.

Tabel 6. Proyeksi Produksi Minyak Bumi Tahun 2000 – 2015 (Juta Barel)

Tahun	2000	2005	2010	2015
Produksi Pertahun	42,9	42,9	42,9	23,4
Produksi Akumulasi	42,9	257,4	479,9	505,3

Sumber: Ditjen Migas, *Blueprint Sumsel Lumbang Energi, ESDM Tahun 2005*

Gas bumi di Propinsi Sumatera Selatan dihasilkan dari proses penambangan gas bumi atau hasil ikutan dari proses penambangan minyak bumi. Produksi gas bumi Sumatera Selatan terus meningkat dari tahun ke tahun sampai 2001. Pada tahun 1998 produksi gas bumi Sumatera Selatan sebesar 172,46 milyar kaki kubik dan pada tahun 2001 meningkat hingga mencapai 270,75 milyar kaki kubik (lihat Gambar 3). Namun sesudah tahun 2001 produksi gas bumi Sumatera Selatan menurun, menjadi 126,71 milyar kaki kubik pada tahun 2003. Penurunan ini otomatis akan berimplikasi pada menurunnya penerimaan bagi hasil dari minyak dan gas bumi untuk Sumatera Selatan.



Gambar 3. Produksi Gas Bumi Sumatera Selatan

Sumber: Ditjen Migas, *Blueprint Sumsel Lumbang Energi, ESDM Tahun 2005*

Dari segi pengembangan produksi, penyediaan gas bumi untuk kebutuhan domestik Propinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 0,6 Juta BOE pada tahun 2002. Kebutuhan tersebut diprediksi akan meningkat apabila upaya diversifikasi dari minyak ke gas bumi dilakukan. Skenarionya adalah usaha diversifikasi energi dan tersambunginya jaringan pipa gas di dalam

pulau Sumatera serta ke pulau Batam dan pulau Jawa, maka produksi gas bumi diperkirakan menjadi 112,4 ~ 114,2 Juta BOE pada tahun 2025 dengan pertumbuhan rata-rata 6,22 ~ 6,31 % per-tahun. Berarti kebutuhan lokal akan terpenuhi dan sisanya dapat disalurkan ke luar daerah Sumatera.

Sementara itu, kenaikan produksi gas yang melonjak lebih disebabkan adanya diversifikasi pemakaian energi, dari BBM ke Gas Bumi terutama pada pembangkit listrik. Tenaga listrik sangat mudah untuk digunakan dan diubah menjadi bentuk energi lain sesuai kebutuhan, misalnya cahaya, panas, dan mekanik serta catu daya untuk peralatan elektronik. Listrik dapat dihasilkan dari transformasi berbagai energi, seperti cahaya matahari, tenaga air, BBM, gas bumi, batubara dan lain-lain (*Studi Pengembangan Listrik 4x600 MW di Musi Rawas* 2006).

Fenomena hidup padamnya aliran listrik yang dikelola PLN membuat masyarakat *a priori* terhadap prospek Sumsel lumbung energi nasional. Idealnya bahwa penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah, maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Indikator yang digunakan sebagai sasaran yang ingin dicapai adalah rasio elektrifikasi dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Rasio Elektrifikasi di Sumsel, Jambi, dan Bengkulu Tahun 2006

No	Provinsi/Cabang	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Jumlah Pelanggan	Ratio Elektrifikasi (%)
1.	SUMSEL	6.701.645	1.354.504	756.665	55,86
	Cab. Palembang	3.472.915	708.758	439.404	62,00
	Cab. Lahat	3.228.730	645.746	317.261	69,13
2.	Jambi	2.568.598	524.204	269.335	51,38
3.	Bengkulu	1.517.181	309.629	200.249	64,67
	WS2JB	10.787.424	2.188.337	1.226.249	56,04

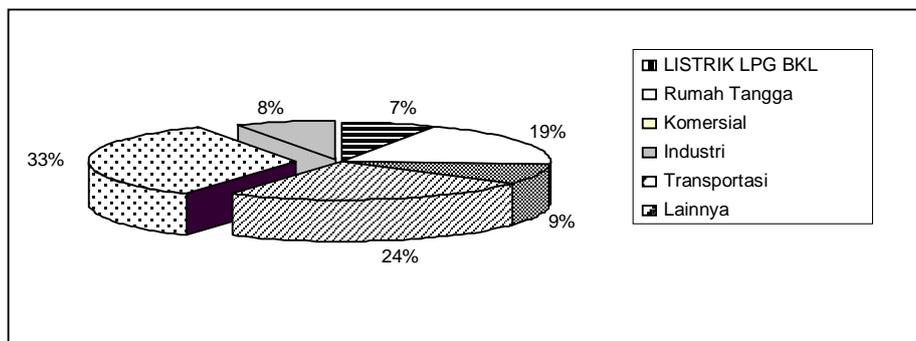
Sumber: Laporan Penelitian Studi Pengembangan Listrik 4x600 MW di Musi Rawas, 2007

Rasio elektrifikasi ini menunjukkan besarnya pelanggan yang menikmati listrik dibanding dengan jumlah KK masing-masing wilayah. Untuk Sumatera Selatan besarnya 55,86% berarti belum seluruhnya dapat dilayani listrik. Sementara itu, untuk wilayah Jambi dan Bengkulu masing-masing sebesar 51,38% dan 64,67%. Sangatlah wajar bila Sumsel mencanangkan program lumbung energi nasional karena belum semua warga menikmati listrik, sementara cadangan energi primer relatif cukup besar. Namun investasi untuk menghasilkan energi listrik tidak kecil, apalagi dukungan pemerintah pusat belum secara konkrit Sumatera Selatan lumbung energi nasional.

Prakiraan Kebutuhan Energi. Salah satu kebutuhan akan energi akan dihitung menurut *per sektor* yang terdiri dari sektor rumah tangga, komersial, industri, transportasi, dan sektor lainnya. Menurut hasil penelitian *Blueprint Sumsel Lumbung Energi 2005*, secara konsepsi bahwa permintaan energi dipengaruhi beberapa faktor, antara lain; jumlah penduduk, pendapatan, harga energi dan faktor lainnya. Di lain pihak, harga energi berbanding terbalik dengan permintaan energi. Apabila harga energi mengalami peningkatan, yang diakibatkan subsidi yang diberikan pemerintah terhadap energi (mis. BBM) mengalami penurunan, maka permintaan energi tersebut akan mengalami penurunan. Kenaikan harga energi (misalnya BBM) tersebut, memacu konsumen untuk melakukan penghematan terhadap penggunaan energi tersebut.

Sementara itu, harga energi yang berlaku secara nasional seringkali dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, sehingga harga energi yang berlaku tidak berdasarkan harga energi yang tercipta dalam mekanisme pasar. Harga energi seharusnya mencerminkan juga tingkat ketersediaan atau kelangkaannya di pasar. Kebijakan penetapan harga oleh pemerintah dan subsidi seringkali 'mendistorsi' harga pasar. Dewasa ini masih ada beberapa jenis energi

migas yang disubsidi sehingga harganya 'underestimate'. Implikasinya harga tidak sesuai permintaan pasar sehingga rentan terhadap isu dan gejolak harga global. Berarti akan berdampak pada nilai PDRB Sumatera Selatan.

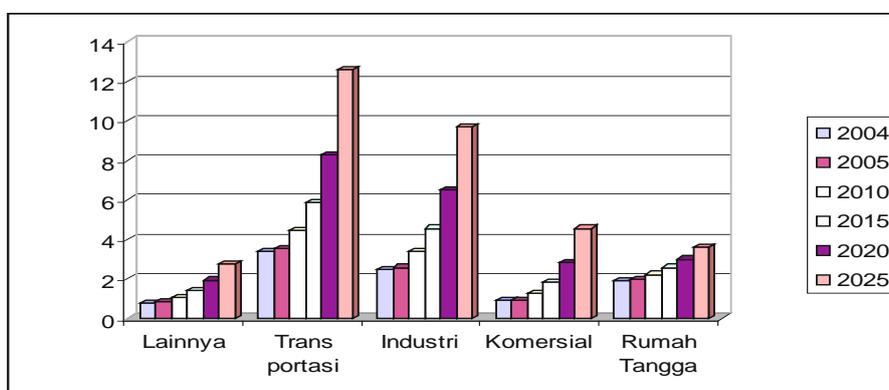


Gambar 4. Persentase Permintaan Energi Final per sektor

Sumber: *Blueprint Sumatera Selatan Lumbung Energi Nasional*

Pada Gambar 4 menunjukkan bahwa permintaan energi final per-sektor di Sumatera Selatan tahun 2004 terdiri dari sektor rumah tangga, sektor komersial, sektor transportasi, sektor industri dan sektor lainnya. Dari kelima sektor tersebut, sektor yang paling banyak menggunakan energi adalah sektor transportasi. Jenis energi yang digunakan oleh sektor transportasi tersebut adalah Bahan Bakar Minyak (BBM). Kemudian sektor yang juga cukup banyak menggunakan energi adalah sektor rumah tangga dan industri. Dengan kata lain, 33,4 persen dari total permintaan energi final digunakan oleh sektor transportasi, 18,7 persen dari total permintaan energi final digunakan sektor rumah tangga, dan 24,3 persen dari permintaan total energi final digunakan sektor industri, sisanya digunakan sektor komersial dan sektor lainnya.

Selanjutnya, penghitungan kebutuhan energi ke depan didasarkan pada permintaan energi final seluruh sektor atau seluruh jenis energi, seperti: BBM, Listrik grid, Natural Gas, Minyak Tanah, LPG, Briket batubara, dan lain-lain. Dapat dilihat, bahwa sektor transportasi berdasarkan skenario dasar merupakan sektor yang paling besar permintaannya. Pada Gambar 5 memperlihatkan bahwa perkiraan sektor transportasi pada tahun 2004 mempunyai permintaan terhadap energi sebesar 3,371 Juta BOE, di sektor rumah tangga sebesar 1,887 Juta BOE dan di sektor industri sebesar 2,448 Juta BOE. Dari tahun dasar ini, permintaan energi terus meningkat tajam, terutama untuk sektor transportasi yaitu kira-kira sebesar 12,60 Juta BOE pada tahun 2025.



Gambar 5. Perkiraan Permintaan Energi Final per sektor

Sumber: *Blueprint Sumatera Selatan Lumbung Energi Nasional 2005*

Prospek permintaan energi final yang diestimasi berdasarkan skenario dasar per sektor terus mengalami peningkatan. Permintaan energi final di sektor transportasi pada tahun 2010 diperkirakan sebesar 4,418 juta BOE, kemudian meningkat menjadi 8,279 juta BOE pada tahun 2020, dan pada 2025 menjadi 12,59 juta BOE atau naik 3,1 kali lipat dari permintaan energi final di sektor transportasi pada tahun 2004. Permintaan energi di sektor Rumah Tangga pada tahun 2010 diperkirakan sebesar 2,220 Juta BOE, kemudian meningkat menjadi 2,998 juta BOE pada tahun 2020, dan meningkat lagi pada tahun 2025 sebesar 3,58 juta BOE. Permintaan energi final di sektor industri pada tahun 2010 diperkirakan menjadi 3,35 juta BOE, kemudian meningkat menjadi sekitar 3 kali lipat dari permintaan energi final di sektor industri pada tahun 2004. Korelasi positif dengan peningkatan kegiatan ekonomi daerah, tetapi negatif dengan cadangan energi dan kualitas lingkungan. Saat ini banyak pemerintah daerah penghasil migas mendirikan perusahaan untuk mengelola sebagian SDA migas. Ini hal yang menarik dikaji dan akan menjadi agenda pembangunan ke depan.

Dampak Eksploitasi Sumber Energi

Dalam *Evaluasi Kinerja Pembangunan Sumsel 2006* memfokus dampak eksploitasi sumber energi migas terhadap aktivitas sosial, terutama penyebaran penduduk, lapangan kerja, dan pembangunan manusia. Penyebaran penduduk adalah distribusi penduduk yang tersebar di suatu wilayah. Pola penyebaran penduduk umumnya terkonsentrasi pada wilayah kecamatan dengan kecenderungan bahwa semakin suatu wilayah memiliki akses pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kemudahan tersedianya sarana prasarana transportasi, maka jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut akan relatif tinggi.

Migrasi penduduk merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan jumlah penduduk dengan dibangunnya pembangkit listrik, eksplorasi barang tambang dan adanya berbagai pembangunan, akan mendorong masuknya migrasi (*Studi Pengembangan Listrik 4x600 MW di Musi Rawas 2006*). Besarnya migrasi penduduk dari wilayah yang satu ke wilayah kegiatan proyek sulit diprediksi dan terkadang tidak dipersiapkan, sehingga hal ini akan memberikan tekanan terhadap berbagai aspek kehidupan sosial seperti lapangan pekerjaan, perumahan dan aspek sosial lainnya. Oleh karena itu kebijakan mengantisipasi besarnya migrasi perlu diperhitungkan lebih konkrit, terutama terkait dengan lapangan pekerjaan.

Sejalan dengan kajian Mulyanto (2006) bahwa penciptaan lapangan pekerjaan bagi penduduk merupakan hal yang sangat *esensial*, karena akan berpengaruh kepada berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi termasuk keamanan. Tingkat pengangguran yang tinggi akan menciptakan parasitisme ekonomi dan menurunkan tingkat kesejahteraan rata-rata penduduk. Jumlah pengangguran terbuka di beberapa daerah lokasi eksplorasi minyak bumi dan gas alam belum banyak berubah dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari jumlah angkatan kerja. Dilihat dari sudut partisipasi angkatan kerja (PAK) terjadi kecenderungan menurun dan hal demikian mengindikasikan bahwa kebijakan yang dilakukan dalam rangka penciptaan lapangan kerja sektor minyak dan gas bumi belum mencapai hasil yang maksimal.

Jika melihat dampaknya terhadap indeks pembangunan manusia (IPM), maka dapat ditentukan dari tiga komponen, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, dan pengeluaran per kapita (Kuncoro, 2005). Setiap komponen IPM, masing-masing mempunyai nilai maksimum dan nilai minimum yang berbeda sesuai dengan standar yang ada. Menurut BPS bahwa nilai rata-rata IPM Sumatera Selatan sebesar 66,0. Selanjutnya, berdasarkan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM), rata-rata Sumatera Selatan hanya 27,7. IKM merupakan indeks komposit yang mengukur depreviasi (keterbelakangan) dalam tiga dimensi/indikator, yaitu (1) lama hidup (penduduk yang diperkirakan tidak berumur panjang), (2) pengetahuan (keteringgalan dalam pendidikan), dan (3) standar hidup layak (keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar).

Jika indikator-indikator IPM dan IKM ini menunjukkan perbaikan selama ada eksploitasi sumber energi, berarti kegiatan tersebut memiliki dampak eksternalitas yang positif. Namun, selama ini masih dikhawatirkan akan terjadi sebaliknya. Indikasinya bahwa hampir seluruh daerah yang memiliki potensi energi primer akan menuntut untuk ikut mengelola energi tersebut, bahkan sudah berlomba-lomba membentuk badan usaha daerah yang notabene 'core business' nya tidak sesuai. Implikasi dari adanya eksploitasi sumber energi primer belum optimal bagi kesejahteraan rakyat. Ini sejalan dengan Susetyo (2006) bahwa upaya perbaikan untuk bagi hasil penerimaan bersumber dari SDA dan pengelolaannya harus lebih besar untuk daerah demi kemajuan ekonomi lokal dan kemakmuran rakyat setempat.

Dampak terhadap Ekonomi Lokal: Kasus Musi Rawas

Secara umum, perkembangan ekonomi Kabupaten Musi Rawas relatif belum menggembirakan. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator yaitu struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan masyarakat. Terkait dengan perkembangan ekonomi tersebut, Kabupaten Musi Rawas semakin memprioritaskan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam, terutama optimalisasi minyak dan gas bumi untuk pembangunan dan pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*Studi Pengembangan Listrik 4x600 MW di Musi Rawas 2006*).

Struktur ekonomi Kabupaten Musi Rawas didominasi oleh dua sektor primer yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Kontribusi dari dua sektor tersebut pada tahun 2000 masing-masing sebesar 33,81 persen dan 44,50 persen dan berkembang menjadi 36,08 persen dan 38,75 persen tahun 2004. Tampaknya sektor pertanian memberikan kontribusi yang meningkat, sementara itu sektor pertambangan dan penggalian sedikit menurun. Hal ini memperlihatkan keterbatasan daerah dalam mengetahui 'lifting' produksi migas dari semua perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Musi Rawas. Apalagi keinginan daerah untuk 'sharing' dalam pengelolaan sumber energi tersebut ibarat 'jauh api dari panggangnya'.

Secara empirik, perekonomian Kabupaten Musi Rawas lambat pertumbuhannya, tetapi ada kecenderungan lebih baik. Hal ini tampaknya semua sektor tumbuh, meskipun pertumbuhannya sedikit fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi dengan migas sebesar 4,42 persen tahun 2004, sementara itu pertumbuhan ekonomi tanpa migas sebesar 5,72 persen tahun 2004. Pada tahun 2000 nilai PDRB dengan migas sebesar Rp 2.379,644 juta dan dengan harga konstan berkembang menjadi Rp 3.565,320 juta tahun 2004. Berarti pertumbuhan ekonomi (PDRB harga konstan) di Kabupaten Musi Rawas sebesar 3,09 persen dengan migas dan sebesar 5,14 persen tanpa migas pertahun periode 2000-2004.

Sementara itu, menyoroti tingkat kesejahteraan dari aspek ekonomi dapat dilihat dari tingkat pendapatan perkapita masyarakat. Pada tahun 2000 pendapatan perkapita dengan migas sebesar Rp 4,70 juta dan tanpa migas sebesar 2,63 juta selanjutnya meningkat menjadi sebesar Rp 6,87 juta dengan migas dan sebesar Rp 4,29 juta tanpa migas. Hal ini mengindikasikan bahwa kemakmuran rakyat relatif meningkat dengan tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita harga berlaku dengan migas sebesar 9,93 persen dan tanpa migas sebesar 13,04 persen.

Prospek sektor ekonomi unggulan dapat dilihat dari struktur dan pertumbuhan PDRB menurut sektor lapangan usaha. Sektor pertanian dalam arti luas meliputi sub sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor perikanan, sub sektor peternakan, dan sub sektor kehutanan. Masing-masing sub sektor memiliki komoditi unggulan yang sekaligus mencerminkan karakteristik kawasan yang menghasilkannya. Indikasi tersebut mencerminkan bahwa Kabupaten Musi Rawas memiliki ciri wilayah agraris sehingga mewarnai pola kehidupan masyarakatnya.

Salah satu andalan produksi Kabupaten Musi Rawas adalah pertambangan minyak dan gas bumi. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian sebesar 38,75 persen tahun 2004, dimana sektor migas sebesar 36,34 persen sedangkan sektor penggalian sebesar 2,41 persen. Berarti porsi bagi hasil penerimaan daerah dari migas juga semakin baik. Sektor penggalian masih memiliki prospek untuk dikembangkan melihat potensi sumber daya mineral yang teridentifikasi cukup banyak, seperti emas, perak, batubara, dan bahan galian lainnya. Kapan potensi dieksploitasi untuk kesejahteraan rakyat? Hal ini tergantung dari kolaborasi investor dan pemerintah daerah melalui program pembangunan yang dapat menimbulkan 'multiplier effect' kegiatan lainnya.

Terkait dengan potensi energi primer, perkembangan produksi listrik, gas dan air minum di Kabupaten Musi Rawas berkembang cukup pesat. Rata-rata pertumbuhannya untuk lima tahun terakhir sebesar 6,92 persen pertahun. Beberapa pembangkit listrik beroperasi di daerah ini, terutama PLTD sedangkan PLTU belum ada. Sub-sektor kelistrikan mengalami kemajuan pesat karena daerah ini memiliki cadangan energi primer berupa batubara relatif besar. Berarti untuk pembangunan PLTU sangat dimungkinkan sekaligus mendukung program Sumatera Selatan sebagai lumbung energi nasional.

Namun, dilema pemanfaatan energi primer muncul bahwa eksploitasi menghadapi keterbatasan infrastruktur sehingga investor belum mampu merealisasikan pembangkit mulut tambang di Musi Rawas. Beberapa perusahaan eksplorasi migas yang beroperasi di Kabupaten Musi Rawas sangat eksklusif dan membatasi diri tanpa memajukan masyarakat sekitarnya. Berarti praktek 'enclave' zaman kolonial tetap dilestarikan sehingga masyarakat di sekitar menikmati *dualisme* kemajuan yang rentan terhadap gejolak sosial dan dampak *eksternalitas negatif* (kerusakan lingkungan).

Perkembangan sektor angkutan dan komunikasi di Kabupaten Musi Rawas yang memanfaatkan energi final relatif berkembang cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan lengkapnya moda transportasi yang dimiliki daerah ini, kecuali pelabuhan laut. Dinamika dan mobilitas penduduk mendorong kuatnya akan aksesibilitas informasi, komunikasi dan transportasi darat dan udara sehingga berpotensi untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 17,18 persen pertahun, yang terdiri dari laju pertumbuhan sub sektor angkutan darat 7,26 persen, sub sektor komunikasi sebesar 6,71 persen. Prospek sektor ini cukup menjanjikan dengan semakin pesatnya aktivitas sektor-sektor ekonomi lainnya, terutama sub sektor pertambangan minyak dan gas bumi, rencana pembangunan PLTU mulut tambang, dan pengembangan aksesibilitas jalan, jaringan listrik, dan pipa gas ke daerah lainnya.

Sementara itu, perkembangan sub-sektor kelistrikan yang dilihat dalam PDRB menunjukkan peningkatan, tetapi perkembangannya belum menggembirakan. Pada tahun 2000 nilainya sebesar Rp 1.354 juta dan meningkat menjadi Rp 1.777 juta pada tahun 2004, berarti ada pertumbuhan rata-rata sebesar 7,03 persen pertahun. Hal ini dikarenakan perkembangan produksinya masih sangat terbatas sehingga belum mampu melayani seluruh kebutuhan warga di daerah ini. Berarti peluang yang sudah ada MOU dengan investor untuk pembangunan PLTU mulut tambang di Kabupaten Musi Rawas sangat prospektif.

Dengan demikian, beberapa implikasi dari eksploitasi sumber energi bagi ekonomi lokal bisa berdampak positif dan negatif antara lain: (1) memberikan sumbangan dana bagi hasil SDA terhadap penerimaan daerah; (2) mempekerjakan tenaga kerja lokal pada bidang tertentu sesuai keahlian yang ada; (3) meningkatkan produksi daerah (PDRB) dari sektor pertambangan dan penggalian serta sektor energi, listrik, air dan gas; (4) menimbulkan dampak pelipatgandaan kegiatan (*multiplier effect*); (5) mengurangi kuantitas dan kualitas lingkungan dari SDA yang bersifat '*unrenewable*'; (6) timbulnya *dualisme* dan *enclave* atas beroperasinya perusahaan multinasional; (7) perilaku masyarakat yang a priori dan anti partisipatif dalam pembangunan; (8) menimbulkan potensi kesenjangan pendapatan antar kelompok warga sekitar proyek pembangunan.

PENUTUP

Kesimpulan

Sumatera Selatan memiliki potensi energi migas yang sangat menjanjikan untuk menjadi lumbung energi nasional, apabila dipenuhi asumsi-asumsi yang mendukungnya. Program pembangunan energi migas pemerintah pusat tidak diikuti oleh program-program aksi dari beberapa departemen yang terkait dengan energi sehingga banyak pembangunan proyek untuk memproduksi energi final tidak atau belum dibangun di Sumatera Selatan.

Pemerintah lokal masih bersifat *ambivalens* sehingga terkesan pencanangan program ambisius lumbung energi nasional berjalan di tempat karena terbatasnya infrastruktur yang ada. “Arogansi” beberapa daerah tercermin dengan tuntutan hak pengelolaan terhadap potensi sumber daya energi migas yang ada di daerahnya, tetapi secara empirik belum siap dalam mengeksploitasinya sehingga dikhawatirkan akan memperparah kondisi lingkungan sumber daya alam.

Eksploitasi sumber energi primer (migas) belum menimbulkan percepatan pertumbuhan ekonomi lokal karena ‘*multiplier effect*’ tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat lokal. Hal ini tampak dari identifikasi besarnya produksi *lifting* tidak transparan, pemerintah lokal tidak diberi wewenang sama sekali untuk mengetahui besarnya produksi energi migas, masyarakat lokal masih menikmati iklim investasi migas seperti masa kolonial yang menimbulkan “*enclaves*”, dan masyarakat lokal masih sangat *a priori* terhadap pembangunan sektor energi migas yang masih tersentralisasi.

Saran-Saran

1. Sejalan dengan era desentralisasi sebaiknya peranan daerah lebih besar, tetapi jangan menimbulkan distorsi kebijakan yang justru sebagai ladang bagi elit daerah untuk “berpesta”. Kecenderungan ini tampak dari beberapa peristiwa di beberapa daerah bahwa banyak tekanan kepada beberapa perusahaan migas yang beroperasi di daerah tersebut sehingga menimbulkan ‘*high cost economy*’.

DAFTAR RUJUKAN

- Blakely, E. J. 1989. *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*, California: Sage Publication, Inc. USA.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Oates, Wallace E. 1995. “Green Taxes: Can We Protect the Environment and Improve the Tax System at the Same Time” *Southern Economic Journal*, April, No. 61, 4; ABI/INFORM Research pp.915.
- Samiadji, Bambang T. 2006. “Local Economic Development (LED): Teori dan Penerapannya”, *Info URDI*, Vol. 15.
- Susetyo, Didik. 2006. “Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, *Orasi Ilmiah* disampaikan dalam rangka Wisuda Sarjana STIE Sultan Mahmud Badaruddin Palembang, Sabtu 21 Agustus 2004.
- Susetyo, Didik. 2004. “Kebijakan Pengendalian Inflasi Regional dalam Mendorong Aktivitas Bisnis dan Ekonomi Daerah Sumatera Selatan”, *Makalah* dalam Forum Diskusi Kebijakan Ekonomi, Moneter, dan Perbankan, Kerjasama BI Palembang dengan FE Unsri, Selasa 21 Desember 2004 di Palembang.
- Tim Penyusun. 2004. *Statistik Ekonomi Energi Indonesia 2004*, Pusat Informasi Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Jakarta.

- Tim Penulis. 2005. "Blueprint Pengembangan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi Nasional", *Laporan Akhir*, Kerjasama P3EM Fakultas Ekonomi Unsri dengan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI.
- Tim Independen. 2006. "Evaluasi Kinerja Pembangunan Sumatera Selatan Tahun 2006", *Laporan Kegiatan*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI.
- Tim Penulis. 2006. "Studi Pengembangan Pembangunan Listrik 4 x 600 MW di Musi Rawas", *Laporan Penelitian*, Kerjasama Baliteks Unsri dengan Bappeda Kabupaten Musi Rawas.